



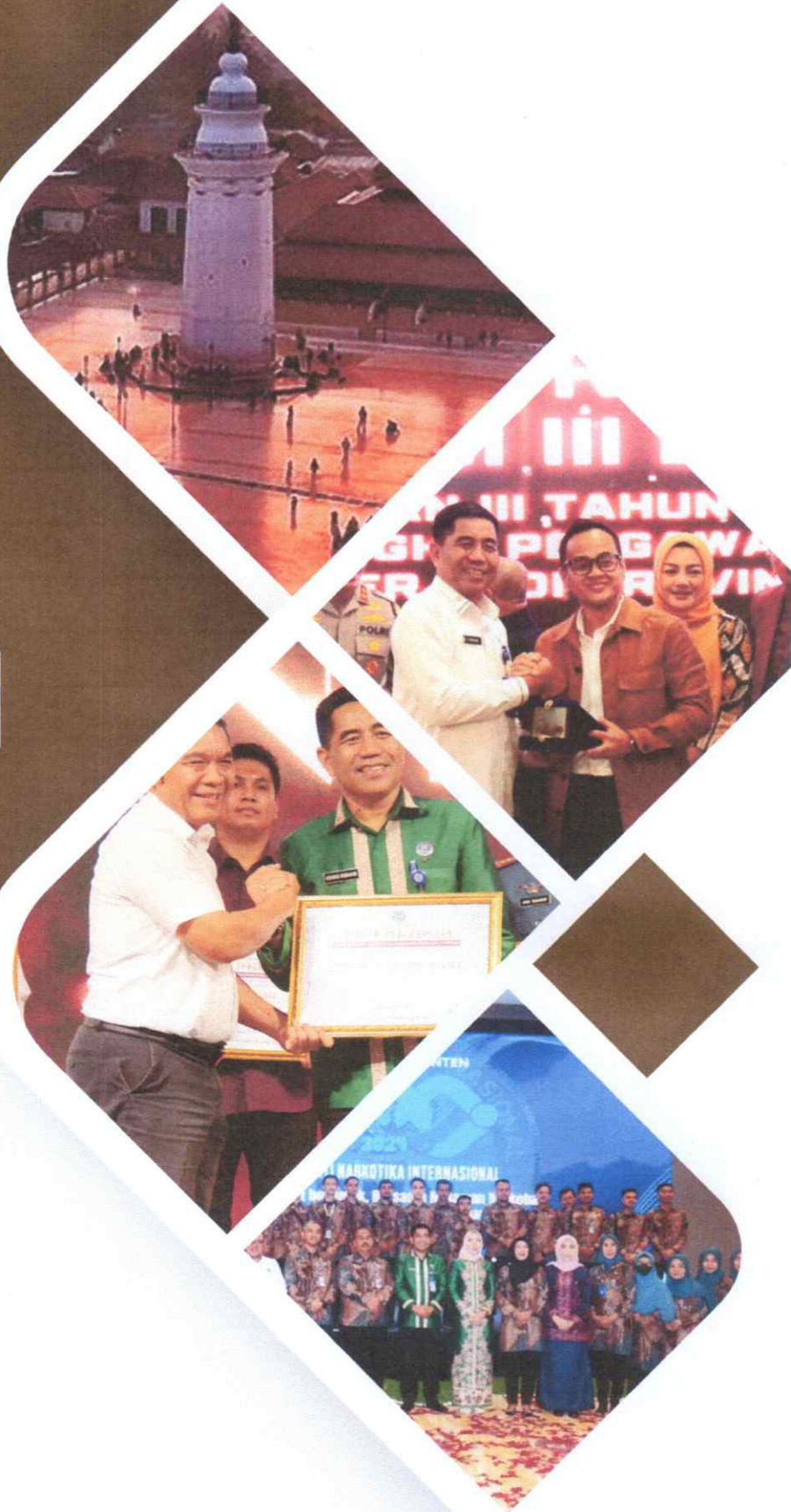
BNN PROVINSI BANTEN

LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BNN PROVINSI BANTEN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@INFOBNN_PROV_BANTEN



@BANTENINFOBNN



BNN PROVINSI BANTEN



BNN BANTEN CHANNEL

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Laporan kinerja merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh BNN Provinsi Banten atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional RI Tahun 2020-2024.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Banten Tahun 2024. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan BNN Provinsi Banten pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Narkotika Nasional secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*

Selaku Kepala BNNP Banten, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024.

Serang, Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten



Drs. Rohmad Nursahid, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Tahun 2024 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten melaksanakan tugas bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Banten wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja Tahun 2024 BNN Provinsi Banten mengacu pada sasaran strategis BNN yaitu:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan indikator kinerjanya Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
2. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi, dengan indikator kinerjanya Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis tersebut melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Realiasi target kinerja kedua program tersebut diimplementasikan melalui 12 (dua belas) sasaran kegiatan dengan 16 (enam belas) Indikator kinerja kegiatan, dengan kriteria capaian sebagai berikut:

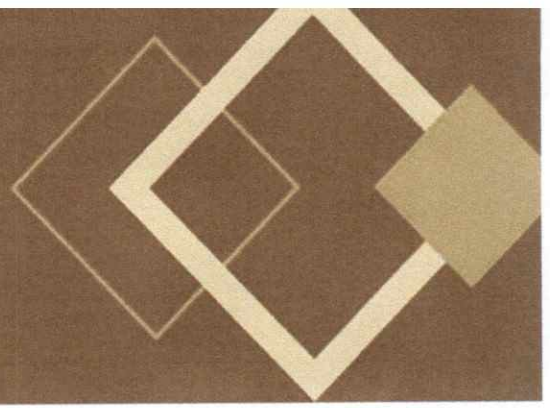
- a. Capaian di atas 100% sebanyak = 14 Indikator Kinerja Kegiatan;
- b. Capaian 85 s/d 100% sebanyak = 1 Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. Capaian 70 s/d 84 % sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Capaian 55 s/d 69% sebanyak = 1 Indikator Kinerja Kegiatan;
- e. Capaian dibawah 55% sebanyak = 0 Indikator Kinerja Kegiatan.

Upaya pencapaian target kinerja BNN Provinsi Banten, dilakukan dengan mendorong kinerja satuan kerja (Satker) melalui pembinaan teknis operasional yang berdampak pada semakin berfungsinya sistem kinerja yang dibangun serta peningkatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi dan semakin timbulnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa kinerja Satker setiap tahunnya sudah menunjukkan peningkatan yang berarti, namun dibalik peningkatan kinerja tidak lepas dari permasalahan dan kendala/hambatan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sumber daya manusia yang paling dibutuhkan saat ini terutama bidang pemberantasan dan rehabilitasi. Sampai saat ini terdapat kekurangan personal bidang pemberantasan dan rehabilitasi seperti penyidik dan dokter. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut diatas dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di BNN Provinsi Banten serta melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah dan juga dengan Polda/ Polres setempat untuk bantuan personil guna mendukung kebutuhan organisasi, bila masih belum mencukupi akan dilakukan penambahan personil tenaga yang dipekerjakan.

Pada akhir tahun anggaran 2024 alokasi pagu anggaran BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota jajaran secara total menjadi sebesar Rp.17.160.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.880.171.534 atau sebesar 98,37% sehingga terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.280.328.466 atau sebesar 1,63%.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi	3
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi/Rencana Program Kerja	5
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Banten	11
III. AKUNTANSI KINERJA	
A. Analisis Capaian Sasaran	14
B. Akuntabilitas Keuangan	68
IV. PENUTUP	
Kesimpulan	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Rencana Kinerja BNN Provinsi Banten Tahun 2024	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BNNP Banten Tahun 2024	11
Tabel 3.1 Capaian Kinerja BNNP Banten Tahun 2024.....	14
Tabel 3.2 Capaian Indikator Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi.....	18
Tabel 3.3 Capaian Indikator DEKTARI BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten 20	
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian DEKTARI Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi dan Nasional	22
Tabel 3.5 Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah Provinsi.	23
Tabel 3.6 Capaian Indikator DEKTARA BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten	25
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian DEKTARA Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi dan Nasional	26
Tabel 3.8 Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi ...	28
Tabel 3.9 Capaian Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten	29
Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKP Wilayah Provinsi dan Nasional	31
Tabel 3.11 Capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup.....	32
Tabel 3.12 Capaian Indikator Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten	33
Tabel 3.13 Capaian Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih	35
Tabel 3.14 Capaian Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten	36
Tabel 3.15 Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi.....	38

Tabel 3.16 Capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional di Wilayah Provinsi	40
Tabel 3.17 Capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional di BNNK/Kota Wilayah Provinsi Banten	41
Tabel 3.18 Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitas BNN	44
Tabel 3.19 Capaian Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21	48
Tabel 3.20 Capaian Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan.	51
Tabel 3.21 Perbandingan Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan Tahun 2020-2024	52
Tabel 3.22 Capaian Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	53
Tabel 3.23 Capaian Nilai Kinerja Anggaran	55
Tabel 3.24 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Mencapai Target.....	58
Tabel 3.25 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Mencapai Target BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten	58
Tabel 3.26 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	60
Tabel 3.27 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA Mencapai Target.....	62
Tabel 3.28 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan IKPA Mencapai Target BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten.....	63
Tabel 3.29 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	65
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota Jajaran Tahun 2024	68
Tabel 4.1 Pencapaian Indikator Kegiatan BNN Provinsi Banten.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BNN Provinsi Banten	5
Gambar 2.1 Visi dan Misi BNN Provinsi Banten.....	7
Gambar 3.1 Fase Perkembangan Unit IBM.....	41
Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Banten	57
Gambar 3.3 Capaian IKPA BNN Provinsi Banten Tahun 2024.....	61
Gambar 3.4 Komponen Pembangunan ZI.....	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Tahun 2021-2024	21
Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Perbandingan Tahun 2021-2024	25
Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi Tahun 2021-2024	30
Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2023-2024.....	34
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih Tahun 2021-2024	37
Grafik 3.6 Perbandingan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Tahun 2021-2024.....	39
Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional di Wilayah Provinsi Tahun 2021-2024	42
Grafik 3.8 Perbandingan Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitas BNN Tahun 2021-2024.....	47
Grafik 3. 9 Perbandingan Capaian Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21	49
Grafik 3.10 Grafik 14. Perbandingan Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan dari Tahun 2020-2024.....	54
Grafik 3.11 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Banten pada Tahun 2021-2024.....	57
Grafik 3.12 Perbandingan Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target dari	59
Grafik 3.13 Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Banten pada Tahun 2021-2024	62
Grafik 3.14 Perbandingan Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target.....	64
Grafik 3.15 Perbandingan capaian Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan	

Penilaian Internal.....	66
Grafik 3.16 Realisasi Anggaran BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota Jajaran Tahun 2024	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

B. Dasar Hukum

**C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta
Struktur Organisasi**

D. Sistematika Laporan



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, dalam setahun terakhir, masih cukup memprihatinkan. Fakta tersebut, menurut hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) tahun 2023, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia menjadi 1,73% atau setara dengan 3,33 juta penduduk Indonesia dalam rentang usia 15-64 tahun terpapar Narkoba dalam setahun terakhir.

Narkotika merupakan salah satu kejahatan *extra ordinary crime* sehingga membutuhkan perhatian khusus dan serius yang mendorong Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menjadikan permasalahan narkoba sebagai salah satu isi strategis dalam misi Asta Cita yang ke-7 (tujuh) yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan **narkoba**”.

Hal ini menunjukkan bahwa peran dari BNN dibutuhkan dan diperlukan langkah yang lebih baik kedepannya untuk penanggulangan permasalahan tersebut. Peran BNN dalam menanggulangi hal tersebut tertuang dalam Rencana strategis BNN yang Periode 2020-2024. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang merupakan pengelolaan praktik sistem akuntabilitas pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai aturan turunan teknisnya diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui sejumlah regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem tatanan pemerintahan yang akuntabel. Setiap kegiatan, program, dan anggaran negara yang dikelola pemerintah harus dapat memberikan hasil (*result oriented government*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang perlu mendapat perhatian di setiap akhir periode pelaksanaan anggaran adalah pelaporan kinerja. Melalui pelaporan kinerja inilah akan disampaikan kepada publik terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan pengukuran kinerjanya, serta gambaran pelaksanaan program kegiatan dengan berbagai dinamikanya. Apapun yang terjadi selama pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan harus dapat diinformasikan atau dikomunikasikan kepada publik melalui laporan kinerja ini. Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja BNN Provinsi Banten Tahun 2024 ini menjadi penting dan menjadi suatu kewajiban dalam pengejawantahan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN.

Penulisan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala BNN Provinsi Banten kepada Kepala BNN RI dan para pemangku kepentingan lainnya atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diperjanjikan pada tahun anggaran 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. DIPA Satker Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Nomor DIPA-066.01.2.682452/2024 tanggal 24 November 2023.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas

Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Banten.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;

- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

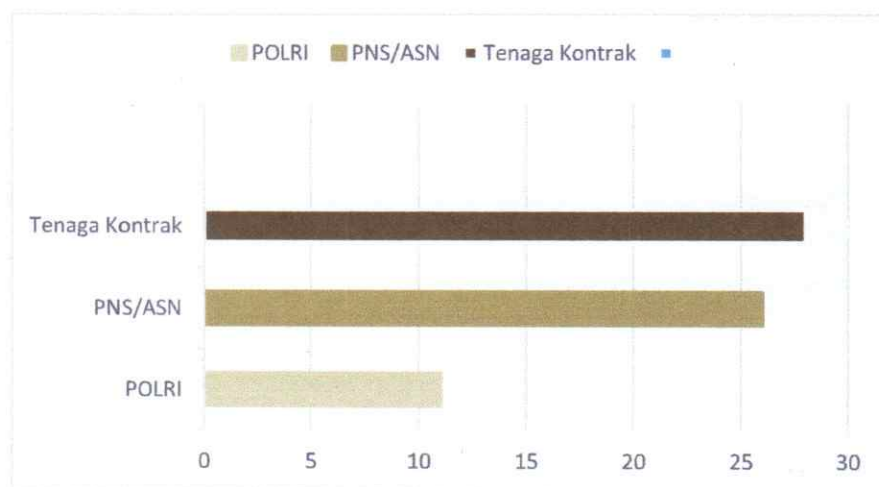
3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 6 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNN Provinsi terdiri atas:

- a. Kepala BNN Provinsi Banten;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Data pegawai BNN Provinsi Banten per 31 Desember 2024, yaitu:

POLRI	: 11 Orang
PNS/ASN	: 26 Orang
Tenaga Kontrak	: 28 Orang
Total	: 65 Orang



STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BNN Provinsi Banten



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategi/Rencana Program Kerja**
- B. Rencana Kerja dan Anggaran BNN Provinsi Banten Tahun 2024**
- C. Perjanjian Kinerja BBN Provinsi Banten Tahun 2024**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020–2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020–2024. Renstra BNN 2020–2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan lembaga, yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN.

Sedangkan arah kebijakan BNN dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan Narkoba adalah dengan:

1. Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba (*demand side*);
2. Meningkatnya upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba (*demand side*); dan
3. Meningkatnya efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (*supply side*).

Adapun strategi BNN untuk melaksanakan arah kebijakan di atas adalah:

1. Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di daerah;
2. Diseminasi informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media;
3. Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi;
4. Rehabilitasi pada korban penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba; dan
5. Kegiatan intelijen Narkoba.

Tujuan BNN yang ditetapkan adalah:

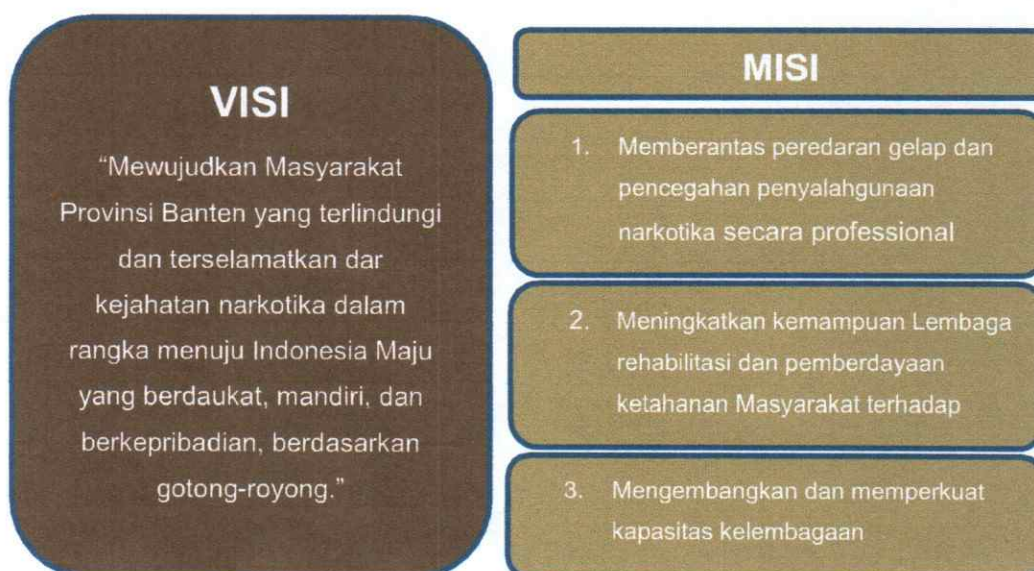
1. Melindungi dan menyelamatkan Masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Indikator: Angka Prevalensi
2. Mewujudkan transformasi layanan public yang berkualitas. Indikator: Indikator Pelayanan Publik

Sasaran BNN yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Terwujudnya manajemen organisasi, professional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Sejalan dengan RPJMN tersebut, BNN sebagai *focal point* penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BNN Tahun 2020-2024 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN.

Sebagai penerjemahan visi dan misi BNN Republik Indonesia, adapun Visi dan Misi BNN Provinsi Banten adalah:



Gambar 2.1 Visi dan Misi BNN Provinsi Banten

Adapun langkah yang ditetapkan dan diperjanjikan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (Satu) tahun. Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran. Berikut adalah matriks rencana kinerja BNN Provinsi Banten tahun 2024:

Tabel 2.1 Matriks Rencana Kinerja BNN Provinsi Banten Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kab/ Kota	388.000.000
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kab/ Kota	434.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3	Kab/ Kota	899.137.000
4	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%	52.115.000
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang	58.280.000
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2	Lembaga	788.031.000
		Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8	Unit	
		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,06	Indeks	

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
7	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika dan Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10	Berkas Perkara	490.000.000
8	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	Indeks	177.130.000
		Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks	
9	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	Indeks	54.068.000
		Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3	Kab/ Kota	
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,78	Indeks	6.803.094.000

No	Program/ Kegiatan/ Komponen/ Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target/ Vol	Satuan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3	Kab/ Kota	
11		Meningkatnya pengelola reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	76	Indeks	0

C. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BNNP Banten Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkoba	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,06 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	10 Berkas Perkara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	tanaman terlarang lainnya		
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 %
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
15	Meningkatnya pengelola reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	76 Indeks
16	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 %



BAB III AKUNTANSI KINERJA

- A. Analisis Capaian Sasaran**
- B. Akuntabilitas Keuangan**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Capaian kinerja BNN Provinsi Banten merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat pemangku program kegiatan dengan Kepala BNN untuk mencapai sasaran strategis, secara *cascading* turun hingga ke level bawah di BNN Kabupaten/Kota jajarannya. Sasaran strategis yang dicapai merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, apakah program dan kegiatan yang dilakukan memiliki *benefit* (manfaat) kepada masyarakat.

Dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Banten Tahun 2024 ditetapkan 12 (duabelas) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 16 (enam belas) indikator. Dari 16 (enam belas) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan melebihi target, 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan sesuai target, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tidak tercapai. Berikut ini dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BNNP Banten Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/ kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	68,42%	100,62 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8 Unit	8 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi Narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,06 Indeks	3,52 Indeks	115,03%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas Perkara	12 Berkas Perkara	120%
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	99,02 Indeks	112,52%
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100%
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,78 Indeks	98,03 Indeks	99,24%
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	66,67%
15	Meningkatnya pengelola reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	76 Indeks	83,09 Indeks	109,33%
16	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks	100 Indeks	100%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Banten.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNNP Banten tahun 2024 dengan sasaran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100%

Definisi dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah Jumlah kabupaten/kota dengan nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk

menyalahgunakan narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu:

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu:
 - b.1 Self Regulation: kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.2 Assertiveness: kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
 - b.3 Reaching Out: kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut:

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

Nilai akhir dari indeks Ketahanan Diri Remaja merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari Hasil Penghitungan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi dengan focus Remaja di lingkungan sekolah dan kampus melalui Teknik Snowball.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 3 kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau 100%. Capaian tersebut berdasarkan Surat Deputi Pencegahan Nomor B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN Tanggal 24 Desember 2024 tentang Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2024. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota. Dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator DEKTARI BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Kategori	Keterangan
1	BNN Kota Tangerang Selatan	52	54,58	Sangat Tinggi	Melebihi Target
2	BNN Kota Cilegon	54,92	56,85	Sangat Tinggi	Melebihi Target
3	BNN Kota Tangerang	55,37	55,80	Sangat Tinggi	Melebihi Target
BNNP Banten				3 Kab/Kota	Tercapai

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Peran serta aktif dukungan pihak sekolah, terutama para guru dalam membantu siswa-siswi dalam pengisian kuesioner P4GN.
2. Digiatkannya pengembangan ketrampilan soft skill pada remaja di lingkungan SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba.
3. Supervisi dilakukan ke tiap BNNK Jajaran Banten untuk pencapaian DEKTARI.
4. Asistensi dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan.

5. Monev dilakukan untuk pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut dapat dilihat pada grafik dibawah ini untuk realisasi capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.

Grafik 3.1 Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2021-2024 capaian target indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tercapai 100% atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa remaja yang telah mengikuti kegiatan terkait ketahan diri anti narkoba di BNN Kota/Kabupaten wilayah Banten memiliki Ketahanan Diri Anti Narkoba yang tinggi.

Realisasi kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian DEKTARI Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi dan Nasional

No.	Wilayah	Target	Realisasi	Keterangan
1	Nasional	53,51	52,04	Tinggi
2	Provinsi Banten		52,67	Tinggi

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja rata-rata nilai DEKTARI wilayah Provinsi Banten mendapatkan nilai sebesar 52,67. Hasil tersebut lebih tinggi daripada capaian realisasi kinerja indeks ketahanan diri remaja secara nasional sebesar 52,04. Namun, belum melampaui target nilai DEKTARI sebesar 53,51 yang tercantum pada Renstra BNN tahun 2020-2024.

Sebagai bahan evaluasi bahwa realisasi kinerja nilai DEKTARI BNN Provinsi Banten sebesar 43,44 dengan kategori sangat rendah. BNN Provinsi Banten khususnya pelaksana teknis akan melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak dan remaja secara terarah dan sistematis lagi di tahun 2025 agar realisasi kinerja di tahun mendatang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih ada beberapa pelajar yang tidak mengisi kuesioner hingga selesai.
2. Pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja (DEKTARI) yang sulit dipahami oleh beberapa siswa.
3. Siswa kesulitan mengisi kuesioner dikarenakan jaringan yang lambat atau tidak ada kuota internet.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah untuk optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Pertanyaan kuisisioner pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja untuk kedepannya bisa dibuat lebih simpel, jelas, dan mudah dipahami.

2. Dilakukan pemantauan secara real time pada aplikasi Dektari yang dapat di akses oleh PIC masing-masing satker, sehingga apabila terdapat siswa yang belum selesai mengerjakan kuesioner dapat segera ditindaklanjuti.
3. Menjalin kerjasama yang baik dan berkoordinasi ke sekolah-sekolah dan dinas terkait.
4. Pengembangan *soft skill* pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba dan menambah kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian target.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah Provinsi.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi.	3 Kab/Kota	3 Kab/Kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori

“Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu:

1. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
2. kriteria indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan keluarga dengan menggunakan cara survei ketahanan kepada keluarga yang dilakukan intervensi dengan menggunakan instrument yaitu:
 1. SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires) adalah alat skrining untuk mengukur penyesuaian psikologis pada anak-anak dan bertujuan untuk mendeteksi masalah emosional atau perilaku.
 2. PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales) adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai perubahan dalam praktik pengasuhan anak dan penyesuaian orang tua. Terdiri dari dua skala: skala Pengasuhan, yang mengukur praktik pengasuhan dan kualitas hubungan orang tua-anak, dan skala Penyesuaian Keluarga, yang mengukur penyesuaian emosional orang tua dan dukungan pasangan serta keluarga dalam mengasuh anak.
 3. CYRM (Child and Youth Resiliences Measure) adalah ukuran laporan diri dari ketahanan sosial-ekologis yang dirancang untuk mengeksplorasi sumber daya yang tersedia bagi individu yang dapat meningkatkan ketahanan mereka.
3. Adapun klasifikasi perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 1. Kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31 – 100,00;
 2. Kategori tinggi dengan nilai 76,61 – 88,30;
 3. Kategori rendah dengan nilai 65,00 – 76,60;
 4. Kategori sangat rendah dengan nilai 25,00 – 64,69.

Berdasarkan surat Berdasarkan Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN Tentang Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun

2024 Tanggal 23 Desember 2024. Dari target yang ditetapkan sebanyak 3 Kabupaten/Kota dengan nilai DEKTARA berkategori tinggi diperoleh capaian sebanyak 3 Kabupaten/Kota (100%) antara lain:

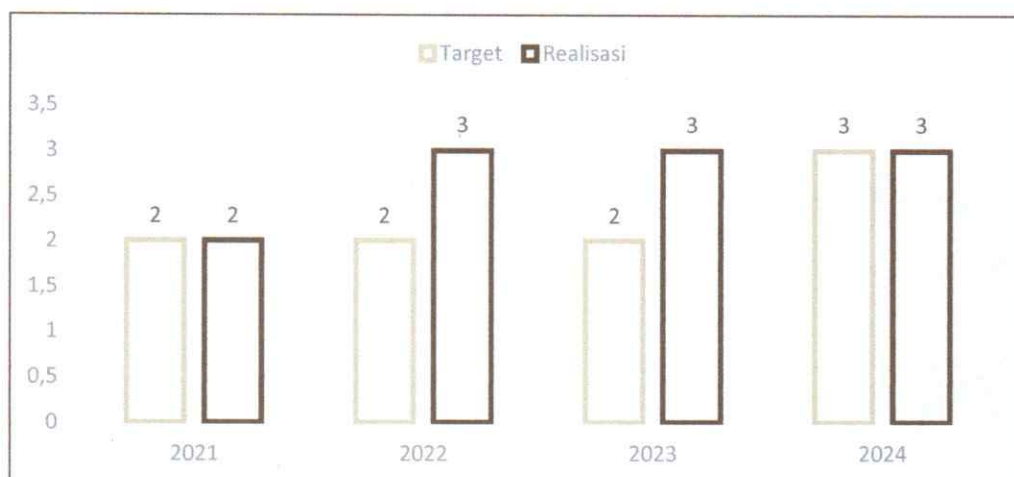
Tabel 3.6 Capaian Indikator DEKTARA BNN Kab/Kota Provinsi Banten

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Kategori	Keterangan
1	BNN Kota Tangerang Selatan	86,339	82,054	Tinggi	Target BNNK tidak tercapai
2	BNN Kota Cilegon	79,554	86,429	Tinggi	Melebihi Target
3	BNN Kota Tangerang	87,232	85,179	Tinggi	Target BNNK tidak tercapai
BNNP Banten				3 Kab/Kota	Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa 3 (tiga) BNNK/Kota jajaran Provinsi Banten tersebut mencapai realisasi nilai DEKTARA berkategori tinggi berdasarkan klasifikasi perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target masing-masing BNNK terdapat 2 (dua) BNNK/Kota yang realisasi nilai DEKTARA tidak tercapai target yaitu BNN kota Tangerang Selatan dan BNN Kota Tangerang. Untuk itu, diperlukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 untuk perbaikan kedepan agar rencana aksi pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dapat menjadi petunjuk pencapaian target secara optimal.

Berikut dapat terlihat pada grafik dibawah ini untuk realisasi capaian jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi dari tahun 2021-2024.

Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” di wilayah Provinsi Perbandingan Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2021-2024 capaian target indikator Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tercapai 100% atau lebih. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga yang telah mengikuti kegiatan terkait ketahan diri anti narkoba di BNN Kota/Kabupaten wilayah Banten memiliki Ketahanan Anti Narkoba yang tinggi.

Realisasi kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi tahun 2024 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian DEKTARA Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi dan Nasional

No.	Wilayah	Target	Realisasi	Keterangan
1	Nasional	78,70	86,787	Tinggi
2	BNNP Banten		91,607	Sangat Tinggi

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja nilai DEKTARA wilayah Provinsi Banten mendapatkan nilai sebesar 91,607 dengan katehori sangat tinggi. Hasil tersebut lebih tinggi dari target indeks ketahanan keluarga sebesar 78,70 pada renstra BNN RI Tahun 2020-2024 dan juga capaian realisasi kinerja indeks ketahanan keluarga secara nasional sebesar 86,787.

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Membuat komitmen dan kerjasama dari keluarga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
2. Supervisi dilakukan ke tiap BNNK Jajaran Banten untuk pencapaian DEKTARA.
3. Asistensi dilakukan untuk peningkatkan pelaksanaan kegiatan.
4. Monev dilakukan untuk pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang diharapkan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam menggunakan teknologi dalam pengisian kuesioner;
2. Keterbatasan kuota internet untuk mengisi kuesioner;
3. Masing-masing anggota keluarga sibuk dengan urusan mereka msing-masing.

Rekomendasi/Rencana Aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Intensif melakukan koordinasi dan pendampingan bagi keluarga yang diintervensi;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/ lingkungan;
3. Sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan IKP berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu:

- a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut:
 1. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
 2. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
 3. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk

melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.

4. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
5. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
6. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

- b. kriteria IKP dalam Lembaga mempunyai karakteristik yang berbeda, maka penilaian IKP didasarkan tabel berikut:

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKP	KRITERIA
1,00 – 1,75	25,00 -43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 – 2,50	43,76 -62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 – 3,25	62,51 -81,25	B	Mandiri
3,26 – 4,00	81,26 -100,00	A	Sangat Mandiri

- c. Kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Berdasarkan surat Berdasarkan Surat Deputi Pemberdayaan masyarakat Nomor B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN Tentang Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2024 Tanggal 11 Desember 2024. Dari Target yang disiapkan sebanyak 3 Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat berkategori “Mandiri” Wilayah Provinsi, BNNP Banten dapat mencapai target tersebut sebanyak 3 Kabupaten/kota (100%) yaitu:

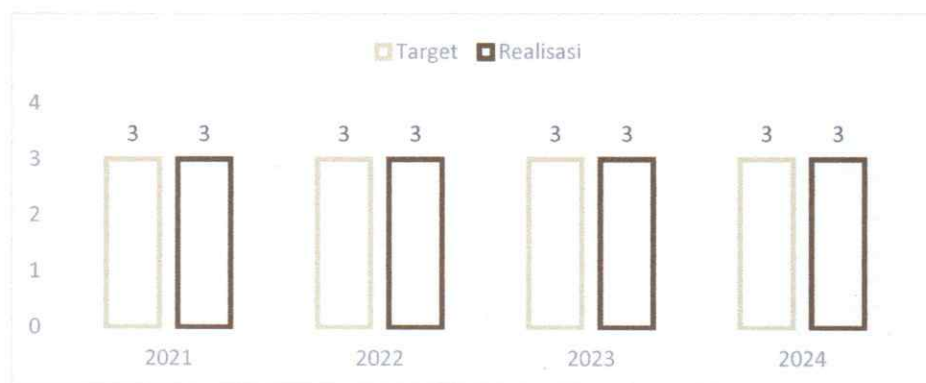
Tabel 3.9 Capaian Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Kategori	Keterangan
1	BNN Kota Tangerang Selatan	3,3	3,55	Sangat mandiri (A)	Melebihi Target
2	BNN Kota Cilegon	3,65	3,65	Sangat mandiri (A)	Tercapai
3	BNN Kota Tangerang	3,3	3,36	Sangat mandiri (A)	Melebihi Target
BNNP Banten				3 Kab/Kota	Tercapai

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) BNNK/Kota jajaran Provinsi Banten tersebut mencapai target bahkan 2 (dua) yaitu BNN Kota Tangerang Selatan dan BNN Kota Tangerang melebihi target yang telah ditetapkan. Sebagai informasi bahwa hasil IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) BNN Kota Tangerang Selatan dan BNN Kota Tangerang mengukur lingkungan masyarakat dan pendidikan, sedangkan BNN Kota Cilegon mengukur lingkungan pemerintah dan masyarakat.

Berikut dapat dilihat pada grafik dibawah ini untuk realisasi capaian Kabupaten/Kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi tahun 2021-2024.

Grafik 3.11 Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa bahwa dari

tahun 2021-2024 capaian target indikator Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi tercapai 100%. Hal ini menunjukkan konsistensi peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN.

Realisasi kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja secara Nasional di lingkungan BNN RI tahun 2024 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian IKP Wilayah Provinsi dan Nasional

No.	Wilayah	Target	Realisasi	Keterangan
1	Nasional	3,90	3,59	Sangat mandiri (A)
2	BNNP Banten		3,56	Sangat mandiri (A)

Dari data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi kinerja rata-rata nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) secara nasional dan capaian IKP BNN Provinsi Banten masih rendah dibandingkan target IKP pada renstra BNN RI tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,90. Sehingga perlu dilakukan penyesuain pelaksanaan kegiatan agar partisipasi masyarakat lebih meningkat untuk dapat mencapai target pada renstra selanjutnya.

Faktor pendukung dalam mencapai jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “Mandiri” wilayah provinsi antara lain adalah:

1. Membentuk Penggiat Anti Narkoba sebagai perpanjangan tangan dari BNNP dan BNNK agar kegiatan P4GN dapat terlaksana dengan maksimal di seluruh wilayah di Provinsi Banten.
2. Melakukan Asistensi ke instansi dan lembaga terkait agar melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri.
3. Sinkronisasi program P4GN dengan instansi dan lembaga terkait di wilayah Provinsi Banten.

4. Pengimplementasikan Inpres 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN yang semakin baik.
5. Kesadaran dan kemandirian masyarakat dan para penggiat anti narkoba bahwa permasalahan narkoba menjadi persoalan Bersama dan dapat diatasi secara Bersama.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di atas adalah terbatasnya anggaran untuk melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba (P4GN) masing-masing lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala di atas sebagai rekomendasi/rencana aksi ke depan yaitu dengan mengajak segenap stakeholder terkait untuk pelaksanaan P4GN masing-masing lingkungan. Hal ini pun termasuk pengimplementasian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	68,42%	100,62%

Definisi operasional dari penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah penyalahguna dan/atau pecandu narkotika memiliki persepsi individu terhadap kehidupan yang

dijalaninya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standard dan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki capital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna.

Metode pengukuran persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF yang sudah disediakan petugas;
2. Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
3. Evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien;
4. Pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF.

Hasil diprosentasikan dengan cara pemberian skor dan diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. 76 – 100 % = kualitas hidup baik;
2. 56 – 75 % = kualitas hidup cukup;
3. < 56 % = kualitas hidup kurang;
4. Apabila dari 20% data tidak lengkap, maka asesmen dibatalkan.

Data yang didapat kemudian dikonversi ke transformasi masing masing domain dengan skor 0-100 yang telah dikeluarkan oleh WHO.

Berdasarkan surat Deputi Rehabilitasi Nomor B/471/I/DE/RH.02/2025/BNN Tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, dengan hasil prosentase peningkatan kualitas hidup BNNP Banten telah memenuhi capaian target tahun 2024 yaitu sebesar 68,42% atau tercapai sebesar 100,62% dari target sebesar 68%. Untuk rincian capaian BNNK/Kota Jajajran sebagai berikut:

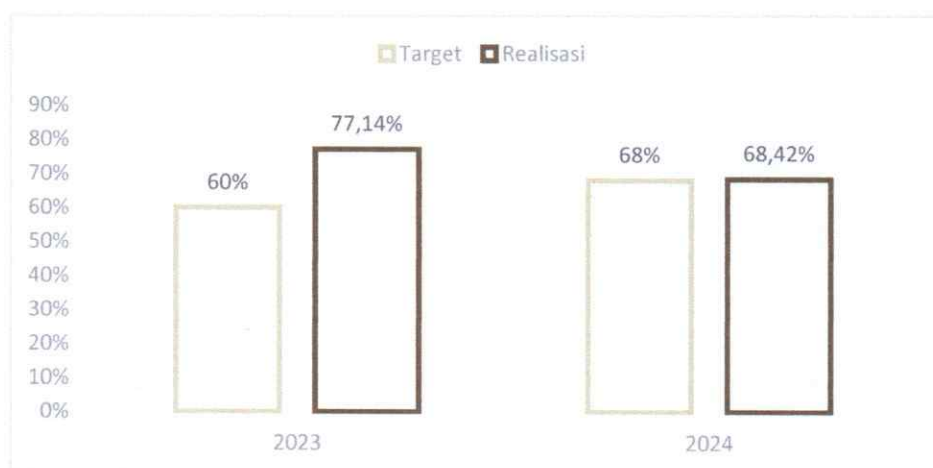
Tabel 3.12 Capaian Indikator Persentase Penyalahguna dan/atau

**Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup BNN
Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten**

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Kriteria	Keterangan
1	BNN Kota Tangerang Selatan	68%	77,42%	kualitas hidup baik	melebihi target
2	BNN Kota Cilegon	68%	65,63%	kualitas hidup cukup	tidak tercapai
3	BNN Kota Tangerang	68%	88,69%	kualitas hidup baik	melebihi target

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) BNNK/Kota jajaran Provinsi Banten tersebut yang melebihi target terdapat 2 (dua) BNNK/Kota yaitu BNN Kota Tangerang Selatan dan BNN Kota Tangerang dan terdapat 1 (satu) BNNK/Kota yang tidak tercapai target yaitu BNN Kota Cilegon sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monitoring yang intensif oleh Tim Rehabilitasi BNN Provinsi Banten.

Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2023-2024



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2023-2024 capaian target indikator persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup tercapai lebih dari

100%. Tentunya hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan kedepan agar klien yang menjalani program mengalami peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Indikator kinerja kegiatan Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup merupakan indikator baru yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2024. Sehingga data tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan layanan rehabilitasi sesuai standar penyelenggara layanan rehabilitasi.
2. Meningkatkan kualitas keterampilan SDM dengan mengikuti beberapa pelatihan teknis petugas rehabilitasi seperti pelatihan terapi kelompok, intervensi krisis, dan motivasional interview (MI).
3. Meningkatkan upaya untuk dapat memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individual klien.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah pemahaman klien terkait isi (pertanyaan) dalam instrument seringkali berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Pelatihan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi;
2. Monitoring perubahan kualitas hidup klien.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 orang	10 orang	100%

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tata laksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Reabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih terealisasi sebanyak 10 orang atau persentase sebesar 100%. Untuk capaian BNNK/Kota jajaran adalah sebagai berikut:

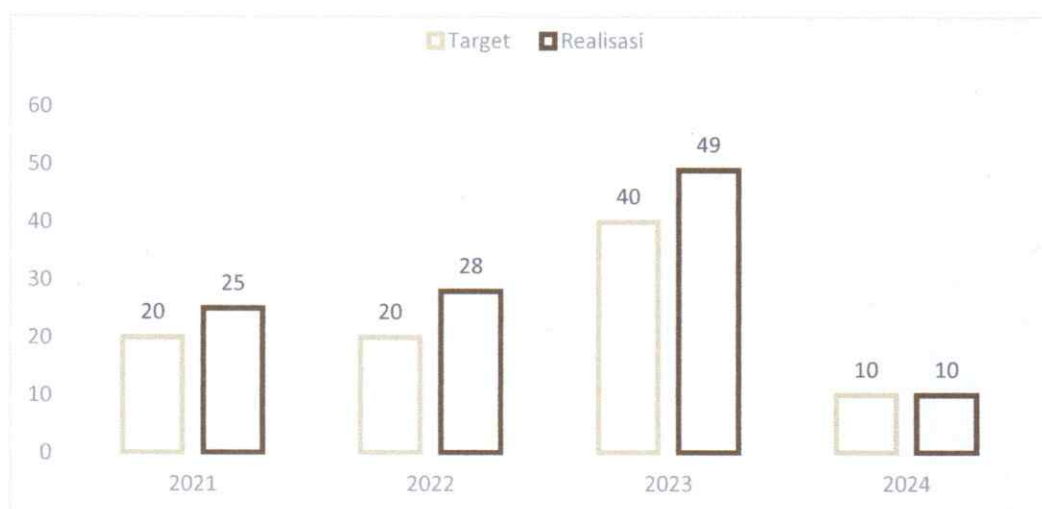
Tabel 3.12 Capaian Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	BNNP Banten	10 orang	10 orang	Tercapai
2	BNN Kota Tangerang Selatan	10 orang	20 orang	Melebihi Target
3	BNN Kota Cilegon	10 orang	10 orang	Tercapai
4	BNN Kota Tangerang	10 orang	10 orang	Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian BNN Kota Tangerang Selatan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dari

target sebanyak 10 (sepuluh) orang tercapai 20 (dua puluh) orang atau 200%. Hal ini dikarenakan BNN Kota Tangerang mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi sebanyak 10 orang. Sehingga capaiannya melebihi target yang ditetapkan.

Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat penurunan target yang signifikan dibandingkan dengan target tahun 2023 dan sebelumnya, hal ini dikarenakan perbedaan penetapan target. Pada tahun 2023 dan sebelumnya penetapan target BNN Provinsi Banten berdasarkan akumulasi dengan BNNK/Kotanya, namun pada tahun 2024 target ditetapkan hanya berdasarkan target BNN Provinsi Banten saja, tidak akumulasi dengan target BNNK/Kota Jajaran. Pada tahun 2024 jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tercapai 100%. Petugas IBM yang dilatih dari Unit IBM Kelurahan Banten Kota Serang dan Desa Baros Kabupaten Serang.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target:

1. Koordinasi dengan pihak kelurahan juga kecamatan lokasi IBM terkait penerbitan SK dan penunjukan agen pemulihan;

2. Mengikuti pelatihan bagi petugas pendamping IBM;
3. Bekerjasama dengan stakeholder sekitar wilayah untuk mendukung kegiatan bimbingan teknis

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Komunikasi yang aktif untuk memberikan pengetahuan lebih mengenai penyelenggaraan rehabilitasi kepada petugas layanan IBM.
2. Lebih sering mengunjungi lokasi IBM untuk memantau dan monitoring penyelenggaraan rehabilitasi.

Sasaran Kegiatan 6
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Capaian Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di Wilayah Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah Lembaga Rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah Lembaga Rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah Lembaga rehabilitasi yang telah mampu mempertahankan

dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 2 lembaga (100%) yaitu lembaga rehabilitasi Yayasan Sahabat (Tangerang Selatan) dan Yasibara (Kota Tangerang).

Berikut dapat terlihat grafik dibawah ini untuk realisasi capaian Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi sebanyak 2 lembaga (100%).

Grafik 3.6 Perbandingan Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bertahap semakin banyak mitra lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi Banten.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target:

1. Dilakukan bimtek dan asistensi kepada lembaga rehabilitasi;
2. Monitoring kelengkapan berkas data dukung untuk pelaksanaan rehabilitasi;
3. Dilakukan pinangkatan kemampuan kepada petugas rehabilitasi.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target

kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana Lembaga rehabilitasi perlu ditingkatkan lagi;
2. Mitra lembaga rehabilitasi belum memiliki petugas yang kompeten untuk kegiatan pendekatan keluarga dan kelompok.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Petugas mitra lembaga rehabilitasi agar mengikuti pelatihan pendekatan keluarga dan kelompok dan mengikuti uji sertifikasi konselor.
2. Melakukan perbaikan bertahap sesuai dengan hasil monitoringa yang dilakukan oleh Tim Rehabilitasi.

Tabel 3.16 Capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional di Wilayah Provinsi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8 Unit	8 Unit	100%

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya. Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), melakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (Drug Abuse Screening Test).

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran berjalan.



Gambar 3.6 Fase Perkembangan Unit IBM

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 8 (delapan) unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi, berdasarkan Surat Plt Deputi Rehabilitasi Nomor B/3498/XI/DE/RH.02.03/2024/BNN Tentang Pemberitahuan Hasil Monitoring Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024 tanggal 05 November 2024 dapat terealisasi sebanyak 8 (delapan) unit atau sebesar 100 %, yaitu antara lain:

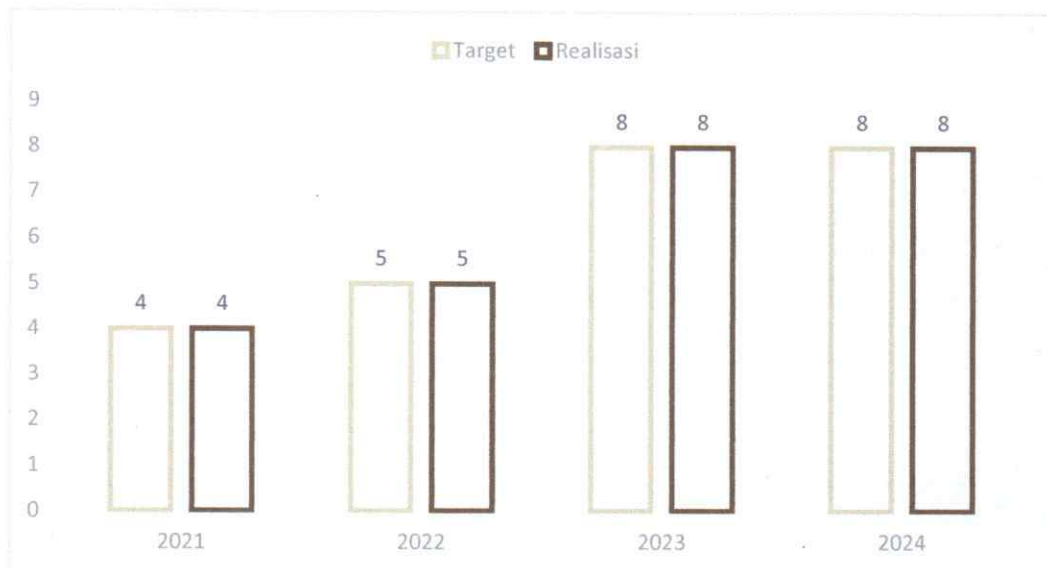
Tabel 3.17 Capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional di BNNK/Kota Wilayah Provinsi Banten

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Kriteria	Lokasi
1	BNN Provinsi Banten	2	2	Tumbuh	IBM Kelurahan Banten
				Tumbuh	IBM Desa Baros
2	BNN Kota Tangerang Selatan	2	2	Berkembang	IBM Kelurahan Jombang
				Tumbuh	IBM Kelurahan Cempaka Putih
3	BNN Kota Cilegon	2	2	Tumbuh	IBM Kelurahan Tamanbaru
				Tumbuh	IBM Kelurahan Bendungan
4	BNN Kota Tangerang	2	2	Tumbuh	IBM Cipondoh Makmur
				Tumbuh	IBM Kelurahan Tanah Tinggi
	TOTAL	8	8		

Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 (tujuh) unit IBM memenuhi fase tumbuh dan 1 (satu) unit IBM memenuhi fase berkembang. Lalu terdapat 2 (dua) unit IBM memenuhi fase rintisan yaitu IBM Kelurahan Benda Baru dan IBM Kelurahan Pondok Benda yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Unit IBM pada fase rintisan belum operasional sehingga tidak termasuk capaian. Untuk itu, kedepan BNN Kota Tangerang Selatan perlu melaksanakan kegiatan pada unit IBM tersebut agar berkelanjutan dan mencapai fase selanjutnya sehingga dapat operasional.

Berikut dapat terlihat grafik dibawah ini untuk realisasi jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi dari tahun 2021-2024. Pada grafik tersebut dari tahun 2021 unit IBM yang operasional meningkat. Hal ini karena didukung dengan anggaran penyelenggaraan unit IBM yang telah ditetapkan pada DIPA BNN Provinsi Banten.

Grafik 3.7 Perbandingan Capaian Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional di Wilayah Provinsi Tahun 2021-2024



Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target:

1. Berkoordinasi dengan pihak kelurahan terkait pembentukan unit IBM
2. Memperbanyak jumlah kegiatan sosialisasi kepada toga, toma dan masyarakat diwilayah kelurahan untuk mengenalkan IBM.
3. Melakukan asistensi dan supervisi pada AP di unit IBM terbentuk.
4. Melakukan peningkatan kemampuan petugas AP melalui Bimtek petugas penyelenggaraan layanan IBM.
5. Sinergitas dengan stakeholder di wilayah IBM termasuk Puskesmas dan Sekolah.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan kegiatan terbatas pada kesediaan anggaran yang ada.
2. Kesulitan dalam mendapatkan klien rehabilitasi;
3. Kemampuan pengetahuan ketrampilan petugas penyelenggara IBM yang terbatas;
4. Agen pemulihan belum aktif secara mandiri untuk melakukan penjangkauan.

Rekomendasi /rencana aksi sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Melalui komunikasi yang aktif dan efektif untuk memberikan pengetahuan lebih mengenai penyelenggaraan rehabilitasi kepada petugas layanan IBM.
2. Melakukan penjangkauan melalui klien yang didampangi sebelumnya untuk mendapatkan klien baru.
3. Melibatkan tokoh agama dalam penjangkauan klien penyalahguna.
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan lebih sering mengunjungi lokasi IBM untuk penyelenggaran rehabilitasi.

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.19 Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitas BNN

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitas BNN	3,06 Indeks	3,52 Indeks	115,03%

Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana wajib melakukan survei kepuasan masyarakat dan wajib mempublikasikan hasil survei.

Terdapat 14 (empat belas) unsur sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

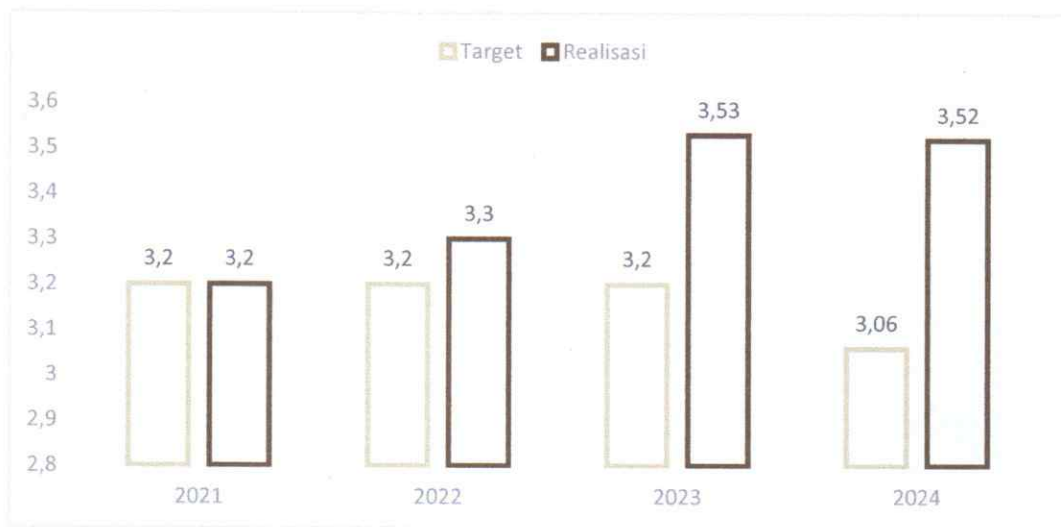
Nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat:

1. 3,533 – 4,00 : A (Sangat Baik)
2. 3,065 – 3,532 : B (Baik)
3. 2,600 – 3,064 : C (Kurang Baik)
4. 2,599 – 1,000 : D (Tidak Baik)

Berdasarkan surat Deputi Rehabilitasi Nomor B/471/I/DE/RH.02/2025/BNN Tanggal 7 Januari 2025 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, dari target 3,06 untuk Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tercapai 3,52 atau sebesar 115,03%.

Berikut dapat terlihat pada grafik dibawah ini untuk realisasi capaian Jumlah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Banten

Grafik 3.8 Perbandingan Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian tahun 2024 turun sebesar 0,01 dibandingkan dengan realisasi capaian 2023 sehingga diperlukan langkah yang strategis agar capaian realisasi Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN tahun selanjutnya lebih baik.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target:

1. Kualitas layanan yang terjaga dengan mempedomani standard layanan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan narkoba.
2. Memperbaiki dan menambah beberapa fasilitas layanan agar sesuai dengan standard.
3. Peningkatan kualitas perilaku petugas pemberi layanan sesuai dengan 5s.
4. Adanya sosialisasi kepada klien oleh petugas pemberi layanan bahwa layanan rehabilitasi sepenuhnya bersifat gratis
5. Petugas Rehabilitasi telah tersertifikasi kompetensi.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan;
2. Perlu adanya dokter tambahan mengingat dokter yang ada di klinik

hanya 1 orang.

3. beberapa klien rehabilitasi belum memahami dalam mengisi kuesioner indeks kepuasan layanan rehabilitasi.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah:

1. Mengajukan permohonan hibah ke Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya memenuhi sarana dan prasarana Klinik Pratama BNN Provinsi dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBN.
2. Mengajukan permohonan penambahan dokter untuk bertugas di Klinik BNN Provinsi Banten.
3. Meningkatkan sosialisasi mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja / survey kepuasan masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di Klinik Pratama BNNP.

Sasaran Kegiatan 8
Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.20 Capaian Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas Perkara	12 Berkas Perkara	120%

Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21 adalah jumlah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa

Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

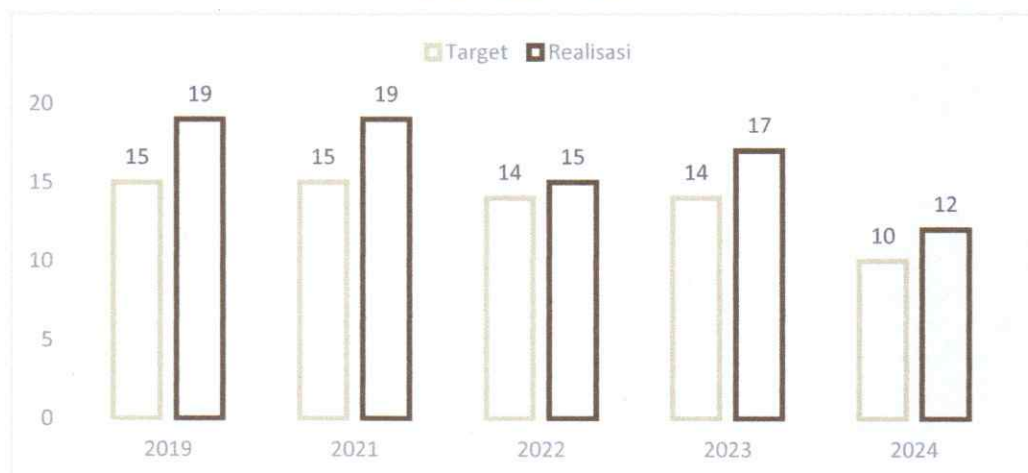
Metode Pengukuran Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21 menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Dari Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 10 jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dapat terealisasi sebanyak 12 berkas P-21 atau sebesar 120% dengan rincian sbb:

1. BNN Provinsi Banten tercapai 10 berkas dari target 10 berkas atau tercapai sebesar 100%;
2. BNN Kota Cilegon tercapai 2 berkas P21 dari hasil pengungkapan peredaran gelap narkotika tahun 2023.

Perbandingan Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika yang P-21 dengan tahun-tahun sebelumnya tergambar dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 Tahun 2021-2024



Pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari perbandingan target dan capaian dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh berbagai hal terutama anggaran dan target kejahatan narkotika. Realisasi capaian pada tahun

2024 sebesar 12 berkas perkara turun daripada capaian pada tahun 2023 sebesar 17 berkas perkara. Hal ini dikarenakan adanya penurunan anggaran dan target yang ditetapkan dari tahun sebelumnya.

Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target antara lain sbb:

1. Pemanfaatan teknologi informasi intelejen;
2. Memaksimalkan potensi SDM Bidang Pemberantasan dan Intelijen untuk segera pengungkapan kasus;
3. Pemanfaat sarana prasarana dalam pengungkapan kasus;
4. Sinergitas dengan stakeholder terkait.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya personil penyidik Polri dan Petugas Pemetaan khususnya untuk BNN Kota/Kab di wilayah Provinsi Banten;
2. Banyaknya ragam modus operandi sindikat jaringan gelap peredaran narkoba.

Rekomendasi/Rencana Aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan penambahan personil penyidik untuk ditempatkan di BNN Kota/Kabupaten.
2. Diperlukannya peningkatan pengetahuan dan keahlian penyidik dalam mendalami suatu kasus dan dapat mengungkapkan kasus-kasus besar, selain itu pelaksanaan penyelidikan juga harus lebih efektif dan efisien.
3. Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait yaitu Polda Banten dan Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.
4. Secara teknis penggunaan IT lebih dioptimalkan dalam pengungkapan kasus dengan BNN Republik Indonesia.

Sasaran Kegiatan 9

Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.25 Capaian Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100%

Definisi operasional dari nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah nilai dari kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang dapat menyebabkan cedera serius ataupun kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas tahanan.

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dengan kriteria yaitu:

- Mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN Provinsi Banten;

Rumus penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100.

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right] \times 100$$

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dapat terealisasi sebesar 100 atau sebesar 100%.

Perbandingan IKK nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya tergambar dalam grafik berikut ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan Tahun 2020-2024



Keberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah:

- Tertib dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan tahanan;
- Petugas jaga tahanan telah dilatih dan diarahkan dengan baik

sehingga tidak ada tahanan yang kabur atau meninggal akibat kelalaian petugas;

- c. Adanya tenaga kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan tahanan.

Rekomendasi/rencana aksi kedepan dalam pencapaian target yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan penambahan personil untuk petugas jaga tahanan;
- b. Penambahan kelengkapan sarana prasarana keamanan untuk ruang tahanan;
- c. Perawatan untuk CCTV ruang tahanan dan akses keluar masuk.

Tabel 3.30 Capaian Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Nilai Tingkat Keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

Dapat dijelaskan definisi operasional dari nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah nilai dari kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non narkotika.

Metode pengukuran nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika dengan kriteria yaitu membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II)

Rumus penghitungan indikator kinerja adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika tidak terdapat perbedaan jumlah dan jenis barang bukti yang

tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a=1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dari BA pengeluaran, maka $a=0$

a_1 = untuk barang bukti 1

a_2 = untuk barang bukti 2, dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dengan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 100 untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba dapat terealisasi sebesar 100% atau sebesar 100%. Perbandingan IKK nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba Tahun 2020-2024 dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.11 Perbandingan Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkoba dan Non Narkoba dari Tahun 2020-2024



Keberhasilan Pencapaian indikator kinerja adalah:

- a. Tertib dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan keamanan barang bukti;
- b. Petugas memiliki ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba.

Kendala dalam pencapaian target, yaitu BNN Provinsi Banten belum mempunyai alat pemusnahan barang bukti khususnya untuk pemusnahan barang bukti ganja. Apabila dibakar ditempat umum akan menimbulkan efek ke masyarakat sekitar sehingga diperlukan oven tertutup untuk pemusnahan.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut di atas yaitu Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Barang Bukti Deputi Pemberantasan BNN RI.

Sasaran Kegiatan 10
Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.31 Capaian Nilai Kinerja Anggaran

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	99,02 Indeks	112,52%

Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Banten adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Banten diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh

Kementerian Keuangan dengan adanya implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, regulasi monev kemudian disesuaikan melalui PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yg sekarang diganti PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Monev Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atau biasa disebut dengan SMART. Semua level yang menjalankan sistem monev ini, menginput data capaian dan memonitor nilainya melalui Aplikasi SMART. Monev Kinerja Anggaran berfokus pada hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Apakah anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang telah ditargetkan. Pada tingkat Satuan Kerja, terdapat empat aspek yang dinilai yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Pencapaian keluaran, dan Efisiensi.

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Kriteria Nilai Kinerja Anggaran yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--------|
| a. Sangat baik | > 90 |
| b. Baik | >80-90 |
| c. Cukup | >60-80 |
| d. Kurang | >50-60 |
| e. Sangat Kurang | = 50 |

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 87 untuk nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Banten dapat terealisasi sebesar 99,02 atau sebesar 112,52%. Pencapaian nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Banten didapat dari penilaian kinerja dari aplikasi Smart Monev anggaran Kementerian Keuangan T.A. 2024 yaitu sebagaimana tertera pada gambar dibawah ini:

MONEV

SADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN / BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNT)

Role: Pish TA (2024) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satuan

Download Excel

Tampilkan 20 50 100 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	000000	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN	100,00	99,02	99,02

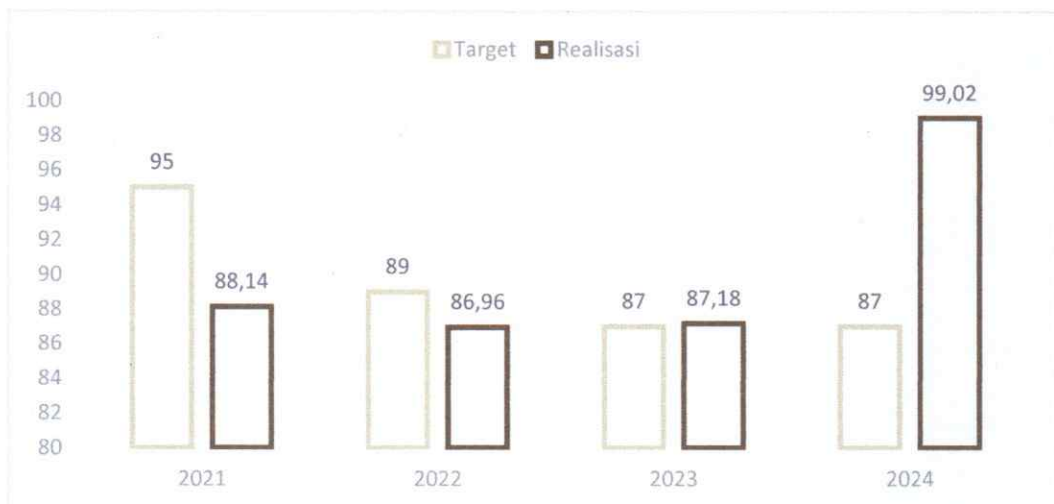
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-09 21:30:43

Gambar 3.11 Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Banten

Grafik 3.12 Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Banten pada Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik di atas terlihat, capaian realisasi pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur perhitungan nilai kinerja anggaran sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam pencapaian target kinerja dapat dideskripsikan bahwa secara umum pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 di BNNP Banten dengan kriteria “Sangat Baik”.

Hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu masih kurang optimal

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terutama adanya kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas pada akhir tahun. Lalu, adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun berjalan yang memerlukan perlu waktu penyesuaian. Terakhir, kurang konsistensinya realisasi anggaran dengan rencana penarikan dananya (RPD).

Rekomendasi / Rencana Aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Perencanaan jika terdapat kendala pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui diklat sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.

Tabel 3.32 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Mencapai Target

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai target	3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	100%

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Banten yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai target yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Mencapai Target BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Kriteria	Keterangan
1	BNN Kota Tangerang Selatan	89	91,22	Sangat Baik	melebihi target
2	BNN Kota Cilegon	88	99,43	Sangat Baik	melebihi target
3	BNN Kota Tangerang	88	100	Sangat Baik	melebihi target

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian nilai kinerja anggaran BNN Kota Tangerang dengan sempurna yaitu 100. Capaian tersebut merupakan nilai tertinggi BNNK/Kota Jajaran Provinsi Banten. Untuk itu, kedepan perlu konsistensi menjaga capaian tersebut. Ketiga BNNK/Kota Jajaran Provinsi Banten yaitu BNN Kota Tangerang Selatan, BNN Kota Cilegon dan BNN Kota Tangerang mencapai realisasi target dengan kriteria “Sangat Baik”. Data pada tabel tersebut berdasarkan aplikasi SMART Kemenkeu.

Berikut dapat terlihat pada grafik dibawah ini untuk realisasi capaian realisasi jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target.

Grafik 3.13 Perbandingan Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target dari Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik di atas terlihat pada tahun 2024 capaian jumlah BNN Kabupaten/Kota yang Nilai Kinerja Anggarannya mencapai target 100%. Capaian ini perlu dipertahankan dengan menjaga kesesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Meskipun pada pelaksanaan tahun berjalan banyak kendala/hambatan.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih kurang optimal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terutama adanya kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas pada akhir tahun dan kurang konsistensinya realisasi anggaran dengan rencana penarikan dananya (RPD).

Rekomendasi /Rencana Aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya upaya maksimal untuk mencapai target capaian rincian output (CRO) sehingga dapat tercapai 100%;
- 2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing;
- 3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan PIC Aplikasi SMART Monev Kemenkeu dan pembina fungsi terkait pelaksanaan kegiatan Program P4GN.

Sasaran Kegiatan 11

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.34 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,78 Indeks	98,03 Indeks	99,24%

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 92 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi dapat terealisasi sebesar 98,03 atau sebesar 99,03%, yaitu sebagaimana terlampir pada gambar dibawah ini:

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyetaraan Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	066	682452	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	99.01	98.63	100.00	100.00	98.00	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.50	19.73	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	95.01		99.16				100.00				

Gambar 3.19 Capaian IKPA BNN Provinsi Banten Tahun 2024

IKPA pada tahun 2024 yaitu adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun berjalan yang memerlukan perlu waktu penyesuaian. Lalu, kurang konsistensinya realisasi anggaran dengan rencana penarikan dananya (RPD) yang menyebabkan deviasi pada Halaman III DIPA. 2. Pengelolaan UP/TUP yang kurang optimal. Terakhir, masih kurang optimal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terutama adanya kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas pada akhir tahun sehingga terdapat efisiensi anggaran yang tidak dapat digunakan.

Berikut dapat terlihat pada grafik dibawah ini untuk Perbandingan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Banten dari tahun 2021-2024.

Grafik 3.14 Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Banten pada Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik di atas terlihat pada tahun 2024 capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya,

Rekomendasi/Rencana Aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya upaya maksimal untuk mencapai target capaian rincian output (CRO) sehingga dapat tercapai 100%.
2. Tertib dalam pengelolaan UP/TUP agar nilai dapat optimal.
3. Adanya Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama yang terus ditingkatkan untuk menyesuaikan penarikan anggaran masing-masing bidang dan bagian agar sesuai dengan RPD yang diajukan.
4. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

Tabel 3.35 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA Mencapai Target

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target	3	3	100

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan nilai IKPA yang diperoleh lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.36 Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan IKPA Mencapai Target BNN Kab/Kota Wilayah Provinsi Banten

No.	Unit Kerja	Target	Realisasi	Kriteria	Keterangan
1	BNN Kota Tangerang Selatan	97,65	99,46	Sangat Baik	melebihi target
2	BNN Kota Cilegon	99,99	98,86	Sangat Baik	tidak tercapai
3	BNN Kota Tangerang	99,87	100	Sangat Baik	melebihi target

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3 (tiga) BNNK/Kota di wilayah provinsi, tercapai 2 (dua) BNNK/Kota yaitu BNN Kota Tangerang Selatan dan BNN Kota Tangerang. Perlu evaluasi untuk mengetahui ketidaktercapaiannya target IKPA pada BNN Kota Cilegon. Capain IKPA

BNN Kota Tangerang sempurna yaitu 100, sehingga perlu dijaga konsistensinya untuk tahun selanjutnya. Data tersebut berdasarkan capaian IKPA masing-masing BNNK/Kota pada aplikasi Omspan.

Berikut dapat terlihat pada grafik dibawah ini untuk capaian realisasi jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target.

Grafik 3.15 Perbandingan Capaian Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terjadi penurunan capaian IKPA tahun 2024 dibandingkan dari tahun 2021-2023.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Target pada kegiatan tidak tercapai sehingga nilai rincian output (CRO) dibawah 100%.
2. Adanya ketidaksesuaian antara RPD dan realisasi anggaran sehingga nilai deviasi >5%.
3. Terdapat anggaran yang terblokir karena kebijakan penghematan perjalanan dinas.
4. Kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan dari masing-masing kegiatan.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang maksimal untuk mencapai target capaian rincian output (CRO) sehingga dapat tercapai di angka 100%.
2. Koordinasi dan kerjasama yang sinergi dalam upaya untuk meningkatkan dan menyesuaikan penarikan anggaran masing-masing bidang dan bagian agar sesuai dengan RPD yang diajukan.
3. Koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

Sasaran Kegiatan 12

Meningkatnya Pengelola Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.37 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai zona integritas BNN berdasarkan penilaian internal	76 Indeks	83,09 Indeks	109,33%

Definisi operasional dari Nilai Zona Integritas adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangun zona integritas di BNN sebagai miniature pelaksanaan reformasi birokrasi di BNN yang bertujuan untuk membangun program RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja brokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan public yang berkualitas. Dalam Pembangunan ZI terdapat komponen yang perlu dipenuhi

yaitu:



Gambar 3.20 Komponen Pembangunan ZI

Metode pengukuran Nilai Zona Integritas pada BNN Provinsi NTB berdasarkan penilaian internal oleh Tim Inspektorat BNN RI yaitu Berdasarkan Surat Inspektur Utama BNN Nomor: B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS Tanggal 30 Desember 2024 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas Berdasarkan Penilaian Internal Pada BNNP Tahun 2024, bahwa capaian indikator nilai zona integritas pada BNN Provinsi Banten yaitu 83,09 atau tercapai sebesar 109,33% dari target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.16 Perbandingan capaian Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal



Berdasarkan grafik tersebut diatas capaian nilai ZI BNN Provinsi Banten berdasarkan penilaian TPI naik dibandingkan tahun 2023. Trend positif ini merupakan kerjasama antara Tim ZI BNN Provinsi Banten untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).

Faktor keberhasilan pencapaian target dikarenakan telah dilakukan pemenuhan dokumen dan kegiatan untuk komponen pengungkit maupun hasil. Namun demikian, masih perlu perbaikan dan keberlanjutan pembangunan zona integritas di BNN Provinsi Banten.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan kompulir dokumen pendukung ZI yang memerlukan waktu.
2. Pemahaman dan kemampuan pegawai dalam memenuhi data dukung tidak merata
3. Kesadaran pegawai untuk membangun zona integritas.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang sinergi masing-masing pokja dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan zona integritas.
2. Bimbingan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam pembangunan zona integritas.
3. Komitmen bersama untuk mengusahakan peningkatan pembangunan zona integritas kedepan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada akhir tahun anggaran 2024 pagu anggaran BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota jajaran secara total menjadi sebesar Rp.17.160.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.880.171.534 atau sebesar 98,37% sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.38 Realisasi Anggaran BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota Jajaran Tahun 2024

SATKER	TOTAL	REALISASI	%	EFESIENSI	%
BNNP Banten	9.848.092.000	9.638.467.334	97,87%	209.624.666	2,13%
BNN Kota Tangerang Selatan	2.796.611.000	2.751.669.657	98,39%	44.941.343	1,61%
BNNK Cilegon	2.116.308.000	2.111.933.242	99,79%	4.374.758	0,21%
BNNK Tangerang	2.399.489.000	2.378.101.301	99,11%	21.387.699	0,89%
TOTAL	17.160.500.000	16.880.171.534	98,37%	280.328.466	1,63%

Berdasarkan pada tabel diatas jika diurutkan persentase realisasi anggaran BNNK dari yang paling tinggi yaitu BNN Kota Cilegon (99,79%), BNNK Tangerang (99,11%), dan kemudian BNNK Tangerang Selatan (98,39%).

Dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 anggaran BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota jajaran mengalami beberapa kali perubahan yang dikarenakan kebijakan pemerintah terkait *automatic adjustment* dan penghematan perjalanan dinas, kebijakan Kepala BNN RI terkait pelaksanaan kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan penambahan anggaran dari hibah pemerintah provinsi dan kota/kab.

Grafik 3.17 Realisasi Anggaran BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota Jajaran Tahun 2024



Berdasarkan grafik tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat efesiensi anggaran pada BNN Provinsi Banten dan BNNK/Kota jajaran sebesar Rp.280.328.466 atau sebesar 1,63%. Efesiensi tersebut berasal dari blokir kebijakan penghematan perjalanan dinas dan sisa anggaran kegiatan yang sudah tidak dapat digunakan sehingga dikembalikan ke kas negara dan daerah (untuk hibah).



BAB IV PENUTUP

A. Penutup



=

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja BNN Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Banten sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Banten telah merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020- 2024.

Capaian Kinerja BNNP Banten dan BNNK Jajaran pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan terdapat sebanyak 12 (duabelas) sasaran kegiatan dan 16 (enam belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNNP Banten.

Akuntabilitas keuangan tahun 2024 tingkat capaian kinerja BNNP Banten, BNN Kota Tangerang Selatan, BNN Kota Cilegon, dan BNN Kota Tangerang yang dilaksanakan dalam tahun 2024 terealisasi mencapai 98,37% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,63%.

Laporan Kinerja ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas capaian kinerja yang telah ditetapkan. Tim Penyusun menyadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna dan maksimal seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNNP Banten dan BNNK Jajaran sepanjang tahun 2024.

Pengukuran Kinerja Outcome

Gambaran pencapaian Indikator Kegiatan BNN Provinsi Banten tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pencapaian Indikator Kegiatan BNN Provinsi Banten

Urutan	Rentang Capaian	Jumlah IKK	%
I	Capaian $\geq 100\%$	14	87,50%
II	$85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$	1	6,25%
III	$70\% \leq \text{Capaian} < 85\%$	0	0%
IV	Capaian $< 70\%$	1	6,25%
V	NA (Not Available)	0	0%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat 14 (empat belas) indikator kegiatan dengan capaian $\geq 100\%$, 1 (satu) indikator kegiatan dengan capaian $85\% \leq \text{Capaian} < 100\%$, dan 1 (satu) indikator kegiatan dengan capaian $< 70\%$.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran

Pencapaian kinerja anggaran BNN Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 setelah dilakukan rekonsiliasi dan berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu sebesar 99,02 dengan kriteria "Sangat Baik".

Langkah yang akan Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja

Guna meningkatkan kinerja BNNI Provinsi Banten dan jajarannya, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepan antara lain sebagai berikut:

1. Permohonan penambahan personil untuk mendukung kegiatan operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN dan

- dukungan teknis manajemen;
2. Pembangunan zona integritas di BNNP Banten dan BNNK Jajaran menuju “WBK” (Wilayah Bebas Korupsi);
 3. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring secara melekat dan komprehensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan muatan pembinaan berlanjut dan tidak hanya dalam bentuk evaluasi saja;
 4. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN;
 5. Meningkatkan kualitas SDM pegawai baik di BNNP maupun BNNK melalui pelatihan dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
 6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan dan operasional.
 7. Optimalisasi penggunaan sistem berbasis *web base* yang tersedia mulai dari perencanaan (*e-planning*), implementasi (Inpres P4GN, Sakti Kemenkue, Sistem Informasi Narkotika, SIRENA BNN dan SIMPEG BNN), hingga sistem evaluasi, pelaporan, dan pengendalian kinerja (Smart Monev Kemenkue, Omspan, dan e-kinerja) sebagai sarana komunikasi, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
BANTEN**

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	8 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,06 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas Perkara

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88 Indeks
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98.78 Indeks
14	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/Kota
15	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	76 Indeks
16	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.434.000.000
2. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.125.000.000
3. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.52.115.000
4. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.899.137.000
5. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.177.130.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.58.280.000
7. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.788.031.000
8. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.490.000.000
9. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.388.000.000
10. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.5.169.772.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.61.500.000
12. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.54.068.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.6.753.094.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.50.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.SI.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BNN PROVINSI BANTEN



Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si.



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU	4,740,464,000	62,056,000	0	0	0	0	0	0	0	4,802,520,000
		REALISASI	4,627,598,377 (97.62%)	53,714,006 (86.56%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,681,312,383 (97.48%)
		SISA	112,865,623	8,341,994	0	0	0	0	0	0	0	121,207,617
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU	0	96,405,000	0	0	0	0	0	0	0	96,405,000
		REALISASI	0.00%	89,335,000 (92.67%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89,335,000 (92.67%)
		SISA	0	7,070,000	0	0	0	0	0	0	0	7,070,000
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	PAGU	0	14,729,000	0	0	0	0	0	0	0	14,729,000
		REALISASI	0.00%	12,372,500 (84.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,372,500 (84.00%)
		SISA	0	2,356,500	0	0	0	0	0	0	0	2,356,500
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU	0	2,895,821,000	130,500,000	0	0	0	0	0	0	3,026,321,000
		REALISASI	0.00%	2,889,164,465 (99.77%)	130,438,125 (99.95%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,019,602,590 (99.78%)
		SISA	0	6,656,535	61,875	0	0	0	0	0	0	6,718,410
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	PAGU	0	116,000,000	0	0	0	0	0	0	0	116,000,000
		REALISASI	0.00%	104,174,000 (89.81%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	104,174,000 (89.81%)
		SISA	0	11,826,000	0	0	0	0	0	0	0	11,826,000
6	3248 Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	PAGU	0	83,700,000	0	0	0	0	0	0	0	83,700,000
		REALISASI	0.00%	83,700,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83,700,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3251 Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	PAGU	0	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000
		REALISASI	0.00%	125,000,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	125,000,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

8	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU REALISASI	0 0.00%	28,710,000 4,400,000 (15.33%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	28,710,000 4,400,000 (15.33%)
		SISA	0	24,310,000	0	0	0	0	0	0	0	24,310,000
9	3257 Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	239,002,000 238,327,000 (99.72%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	239,002,000 238,327,000 (99.72%)
		SISA	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	675,000
10	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	PAGU REALISASI	0 0.00%	198,300,000 183,950,000 (92.76%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	198,300,000 183,950,000 (92.76%)
		SISA	0	14,350,000	0	0	0	0	0	0	0	14,350,000
11	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU REALISASI	0 0.00%	92,075,000 92,075,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	92,075,000 92,075,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	174,215,000 154,487,961 (88.68%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	174,215,000 154,487,961 (88.68%)
		SISA	0	19,727,039	0	0	0	0	0	0	0	19,727,039
13	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU REALISASI	0 0.00%	238,045,000 236,695,000 (99.43%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	238,045,000 236,695,000 (99.43%)
		SISA	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
14	5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	PAGU REALISASI	0 0.00%	482,700,000 482,665,900 (99.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	482,700,000 482,665,900 (99.99%)
		SISA	0	34,100	0	0	0	0	0	0	0	34,100
15	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	130,370,000 130,370,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	130,370,000 130,370,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

GRAND TOTAL		4,740,464,000	4,977,128,000	130,500,000	0	0	0	0	0	0	9,848,092,000
	PAGU	4,627,598,377	4,880,430,832	130,438,125							9,638,467,334
	REALISASI	(97.62%)	(98.06%)	(99.95%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(97.87%)
	SISA	112,865,623	96,697,168	61,875	0	0	0	0	0	0	209,624,666



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	682452 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN	PAGU	4,740,464,000	4,977,128,000	130,500,000	0	0	0	0	0	0	9,848,092,000
		REALISASI	4,627,598,377 (97.62%)	4,880,430,832 (98.06%)	130,438,125 (99.95%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,638,467,334 (97.87%)
		SISA	112,865,623	96,697,168	61,875	0	0	0	0	0	0	209,624,666
GRAND TOTAL		PAGU	4,740,464,000	4,977,128,000	130,500,000	0	0	0	0	0	0	9,848,092,000
		REALISASI	4,627,598,377 (97.62%)	4,880,430,832 (98.06%)	130,438,125 (99.95%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	9,638,467,334 (97.87%)
		SISA	112,865,623	96,697,168	61,875	0	0	0	0	0	0	209,624,666



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

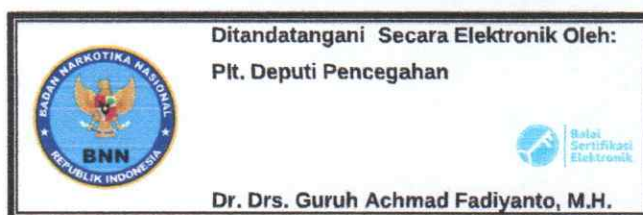
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWA	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAHI	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

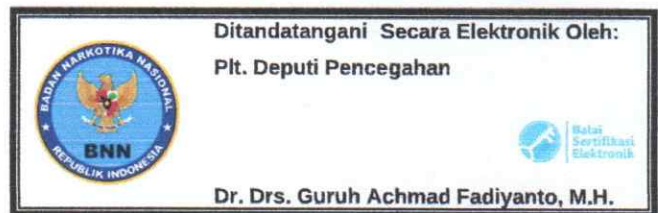
REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

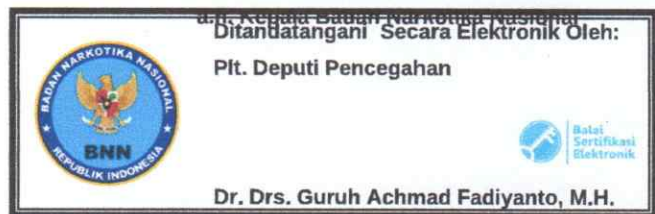
/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANJAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



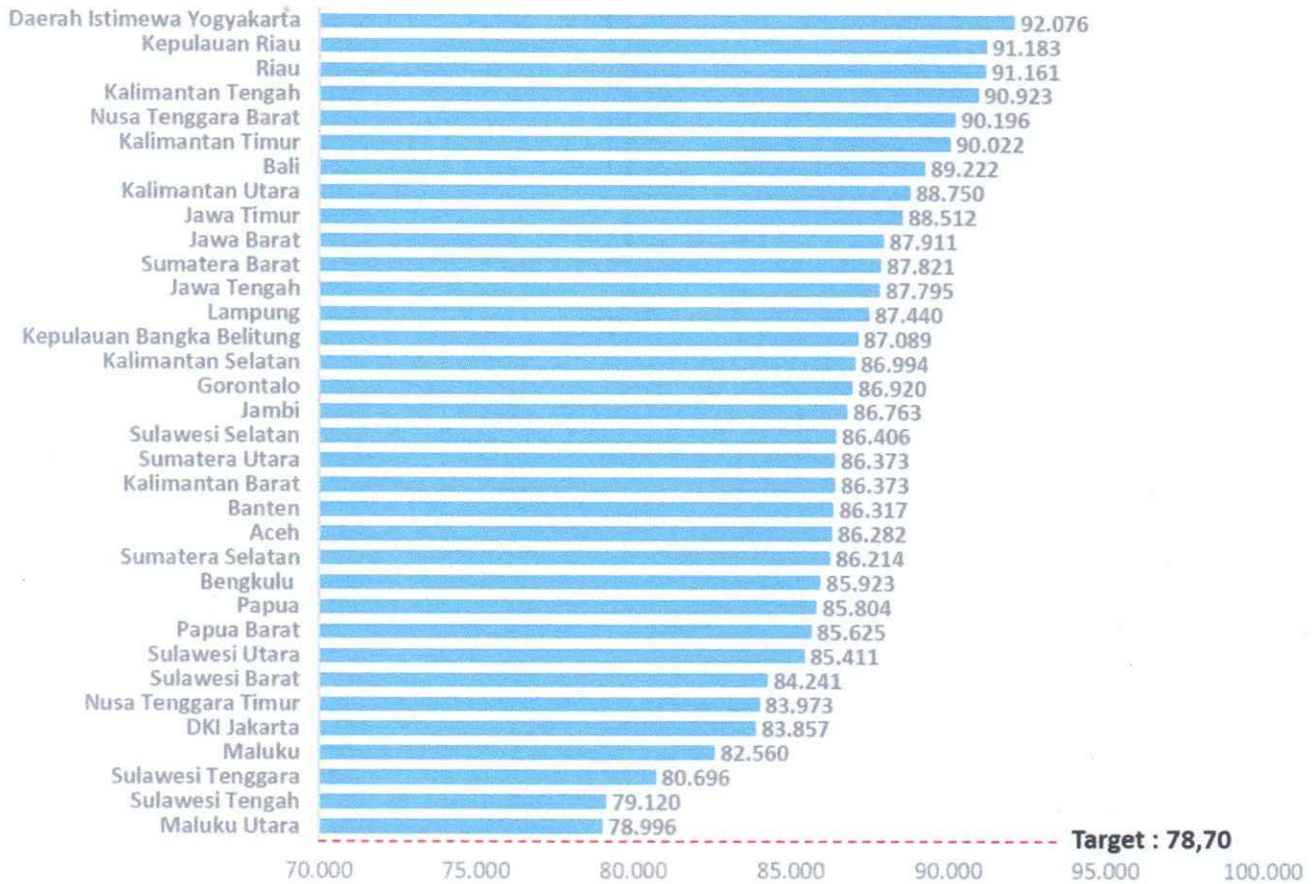
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Pjt. Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Plt. Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

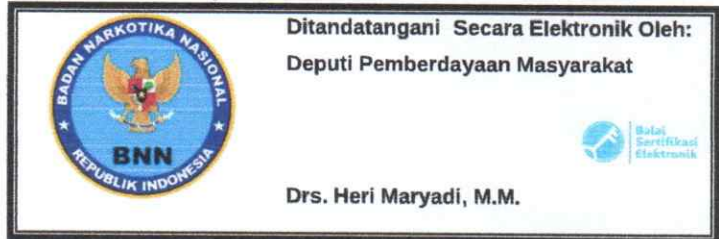
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK TJ. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAHI	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
10 0	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
10 1	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
10 2	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
10 3	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
10 4	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
10 5	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
10 6	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
10 7	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
10 8	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
10 9	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
11 0	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
11 1	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
11 2	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
11 3	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGASEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
14 2	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
14 3	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
14 4	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
14 5	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
14 6	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
14 7	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
14 8	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
14 9	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
15 0	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
15 1	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
15 2	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
15 3	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
15 4	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
15 5	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
15 6	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
15 7	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
15 8	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
15 9	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
16 0	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
16 1	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 2	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
16 3	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
16 4	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
16 5	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
16 6	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 7	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
16 8	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
16 9	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGERA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
17 0	BNNP SULAWESI TENGGARA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
17 1	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
17 2	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
17 3	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
17 4	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
17 5	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
17 6	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
17 7	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
17 8	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
17 9	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
18 0	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
18 1	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
18 2	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
18 3	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18 4	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
18 5	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
18 6	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
18 7	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
18 8	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
18 9	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
19 0	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
19 1	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
19 2	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
19 3	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
19 4	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
19 5	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
19 6	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
19 7	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

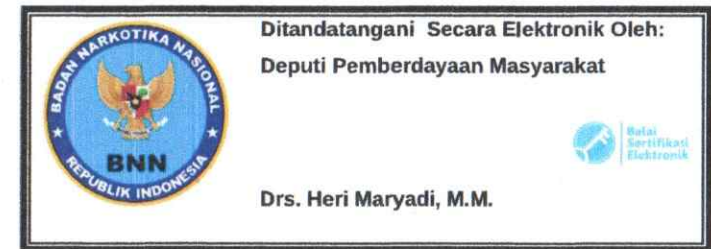
LAMPIRAN

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN

TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputy Rehabilitasi BNN;
 - f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputy Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI
TAHUN 2024

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	3.69	88.55
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
Bengkulu	3.68	3.69	78.42
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	3.24	3.48	85.14
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	3.6	3.65	83.85
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	3.93	3.57	76.30
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	3.72	3.65	91.18
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	3.2	3.5	77.17

LAMPIRANSURAT Plt. Deputi RehabilitasiNOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNNTANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	97.47
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

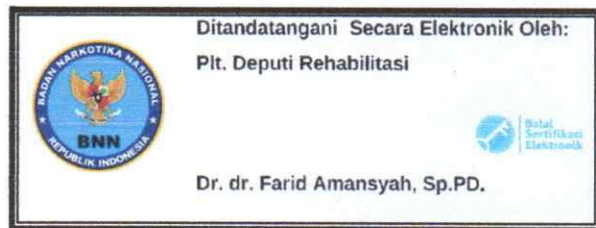
LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3.64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	020	066	682452	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	90.01	98.63	100.00	100.00	98.00	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.50	19.73	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	95.01		99.16				100.00				



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator
Kinerja Nilai Zona Integritas
Berdasarkan Penilaian Internal Pada
BNNP Tahun 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala BNNP**

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian indikator kinerja kegiatan Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

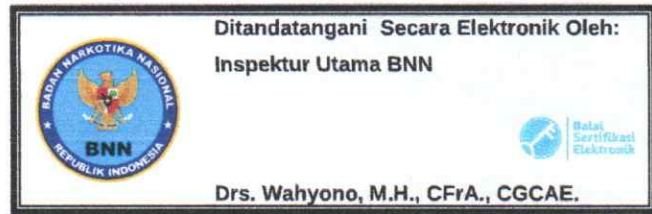
3. Berdasarkan dengan butir dua, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

menjadikan capaian tahun 2024 sebagai acuan penentuan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2025.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.



Tembusan :
Sekretaris Utama BNN

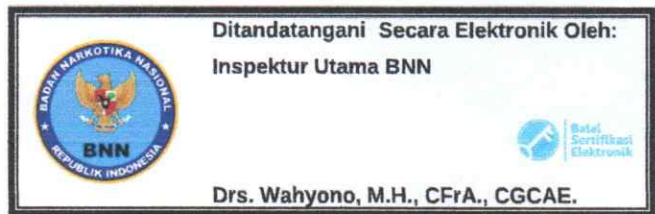


**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32
12	BNNP Banten	47.17	35.92	83.09
13	BNNP Jawa Barat	48.79	34.24	83.03
14	BNNP Sulawesi Barat	46.53	34.53	81.06
15	BNNP Kepulauan Riau	43.82	36.63	80.45
16	BNNP Sumatera Utara	45.59	34.44	80.03
17	BNNP Papua Barat	45.32	34.48	79.80
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44
19	BNNP Riau	41.80	34.04	75.84
20	BNNP Maluku	43.62	32.05	75.67
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	39.30	35.99	75.29
22	BNNP Kalimantan Barat	40.72	34.33	75.05
23	BNNP Sulawesi Tenggara	41.54	33.50	75.04
24	BNNP DKI Jakarta	41.77	33.26	75.03
25	BNNP Aceh	41.74	33.28	75.02
26	BNNP Sulawesi Utara	31.94	36.87	68.81

LAMPIRAN
SURAT Inspektur Utama BNN
NOMOR : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
TANGGAL : 30 Desember 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
27	BNNP Jambi	32.60	35.97	68.57
28	BNNP Nusa Tenggara Timur	32.72	35.49	68.21
29	BNNP Kalimantan Utara	32.25	35.62	67.87
30	BNNP Bengkulu	43.83	22.50	66.33
31	BNNP Gorontalo	29.66	34.38	64.04
32	BNNP Maluku Utara	37.63	16.88	54.51
33	BNNP Papua	35.60	17.00	52.60
34	BNNP Sulawesi Tengah	31.25	1.25	32.50



CONTACT US



@INFOBNN_PROV_BANTEN



@BANTENINFOBNN



@BNN PROVINSI BANTEN



@BNN BANTEN CHANNEL